

ABSTRAK

Penulisan tesis ini membahas mengenai Pembebasan Utang Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak. Peranan pajak sangat penting dalam keuangan negara. Pajak menjadi dibutuhkan dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya pengeluaran rutin negara. Namun, tidak jarang terdapat tindakan wajib pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Kondisi tersebut disadari oleh pemerintah sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Pengampunan Pajak mengakibatkan timbulnya berbagai pandangan di masyarakat karena untuk beberapa wajib pajak yang patuh, menganggap bahwa para pelanggar pajak diberikan kemudahan atas kesalahan mereka. Sehingga hal tersebut tidak mencerminkan keadilan sebagaimana yang termasuk salah satu tujuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai legalitas pembebasan utang pajak dalam rangka pengampunan pajak dan upaya hukum bagi wajib pajak yang dikenai sanksi akibat pelanggaran peraturan pengampunan pajak. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian hukum *doctrinal research* yang menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa legalitas pembebasan utang pajak telah memenuhi syarat sahnya suatu aturan baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi. Upaya hukum wajib pajak yang dikenai sanksi akibat pelanggaran peraturan pengampunan pajak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, terkait aturan lebih lanjut dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Kata kunci: pengampunan pajak, pembebasan utang, keadilan

ABSTRACT

The writing of this thesis discusses Tax Debt Exemption in the Framework of Tax Amnesty. The role of tax is very important in state finances. Taxes are needed in financing the country, in particular. However, no tax is needed. This condition was realized by the third country government Act Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. However, with the issuance of the Tax Amnesty Law, there were various variations among tax members, which allowed tax offenders to provide comfort for their mistakes. If this does not reflect features that are one of the objectives of the law.

Based on this, the researcher will conduct further research regarding the legality of tax debt exemption in the context of tax amnesty and legal remedies for taxpayers subject to sanctions due to violations of tax amnesty regulations. This study was qualified as a normative juridical legal research with doctrinal research type of legal research that used a law approach, and a conceptual approach.

From this study the researcher concludes that the legality of the exemption of tax debt has fulfilled the legal requirements of a regulation both in terms of authority, procedure, and substance. The taxpayer's legal efforts that are subject to sanctions due to violation of tax amnesty regulations by filing a lawsuit to the Tax Court, it can be seen further in Law No. 14 of 2002 concerning Tax Court.

Key words: tax amnesty, debt relief, justice